



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
UNIT KERJA : PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAMONO
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT
3. NHK : 55251

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 410.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/100 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 461 m2/70 m2 di BOYOLALI, WARISAN Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 243.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV 2.4 A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, HONDA PCX 160 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 148.400.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 164.173.332**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 965.573.332**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 965.573.332

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.